



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN  
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM  
DI KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**SILVI AMALIA ROSIDHA**

**NPM. 201003742017584**

**SEMARANG  
2024**



**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN  
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM  
DI KABUPATEN KENDAL**

**ABSTRAK**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :  
SILVI AMALIA ROSIDHA  
NPM. 201003742017584**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,**

**Dr. MASHARI, S.H., M.Hum  
NIDN : 0607056401**

**Anggota,**

**Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H  
NIDN : 0606066205**

**Anggota,**

**Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si  
NIDN : 0607106402**

**Mengetahui  
Dekan,**

**Pro. Dr. Euy Endiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Asing .....	10
1. Konsep Peran .....	10
2. Dinas Tenaga Kerja.....	13
3. Hak-Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing .....	20

1. Pengertian Pengawasan .....	20
2. Jenis-Jenis Pengawasan .....	21
3. Peraturan Pengawasan .....	22
4. Pelaksanaan Upah Minimum .....	27
C. Tinjauan Khusus Tentang Tenaga Kerja Asing .....	34
1. Pengertian Dinas Tenaga Kerja Asing .....	34
2. Pelaksanaan Upah Minimum .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian .....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Penyajian Data .....	50
F. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal.....	51
B. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	53
C. Kendala Dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	64
D. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten Kendal.....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan pekerjaan agar mendapatkan upah. Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (2) Bagaimana kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (3) Bagaimana peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Kendal dilakukan oleh Satwasker di wilayah Kabupaten Kendal terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya harus membuat rencana kerja. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya terlebih dahulu harus membuat rencana kerja. (2) Kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal pada kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Satwasker Wilayah Semarang dengan datang ke tempat kerja dan melakukan pengecekan dokumen perusahaan, seperti izin, buku terbukti melakukan pelanggaran upah minimum akan diterbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan. Selain itu pada kegiatan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan norma kerja, meliputi: waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan, dan lain-lain. (3) Peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan. Kepala Satwasker untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengenai informasi yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Keterlibatan pekerja dalam pengaduan atau laporan terhadap perusahaan yang melanggar pengupahan masih sangat minim.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja; Pengawasan; Upah Minimum